



Penaklukan Inggris atas Bangsa Boer di Afrika Selatan (Perang Boer II 1899-1902)

Naomi Burame

^{1,2} Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Cenderawasih

*Email: naomiburame1@gmail.com

ABSTRACT

This historical study examines the British conquest of the Boer nations in South Africa during the Second Boer War from 1899 to 1902. Utilizing the historical research method—comprising heuristics, source criticism, interpretation, and historiography—this paper analyzes the escalating political, territorial, and economic conflicts between the British Empire and the independent Boer republics of the Orange Free State and Transvaal. The discovery of diamonds and gold in the late 19th century intensified British imperial ambitions and capitalist expansion, leading to friction over the political rights of British expatriates (Uitlanders) and ultimately triggering open warfare. Although Boer commandos achieved initial successes during the early phase of the conflict, the British response—led by Lord Roberts and Lord Kitchener—mobilized massive reinforcements and deployed harsh counterinsurgency strategies, including a scorched-earth policy and concentration camps. The war officially concluded with the signing of the Treaty of Vereeniging in 1902, which ended the independence of the Boer republics and paved the way for the establishment of the Union of South Africa in 1910, reshaping the region's political and social landscape throughout the twentieth century.

Kata Kunci: *Second Boer War, British Imperialism, South Africa, Orange Free State, Transvaal*

PENDAHULUAN :

Afrika Selatan terletak di benua Afrika bagian selatan, di mana bagian Afrika Selatan terkenal dengan tambang-tambang yang menghasilkan emas dan intan-intannya. Sehingga, banyak negara yang memperebutkan Afrika terutama pada bagian selatan (Afrika Selatan). Afrika Selatan telah menggoda beberapa negara untuk menguasainya terutama pada bagian tambangnya. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara kekuatan imperialis Inggris dan negara-negara asli Afrika Selatan. Dalam historiografi modern, perang ini dipahami sebagai manifestasi dari benturan antara **nasionalisme Boer** yang berusaha mempertahankan kemerdekaan republik-republiknya dengan **imperialisme Inggris** yang berupaya mewujudkan supremasi politik dan ekonomi di Afrika bagian selatan.

Orang Boer bukanlah pribumi asli afrika, mereka adalah keturunan orang kulit putih. Tetapi, orang Boer ini sudah berabad-abad di Afrika dan mayoritas orang Boer lahir dan besar di afrika. Asal-

usul masyarakat Boer bermula dari pendirian koloni Belanda di Tanjung Harapan pada tahun 1652 oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Para pemukim Belanda, yang kemudian berkembang bersama imigran Jerman dan Huguenot Prancis, membentuk komunitas petani (*boeren*) yang menggantungkan hidup pada pertanian dan peternakan. Selama lebih dari satu abad mereka berkembang relatif mandiri dengan identitas budaya, bahasa, dan agama Calvinis yang kuat.

Memasuki awal abad ke 19, terjadi perubahan besar yang mengubah hidup orang Boer. Kekuasaan Belanda berakhir dan digantikan oleh pemerintah kolonial Inggris. Saat perang Napoleon, Inggris mencaplok Tanjung Harapan pada 1806 dari tangan Kerajaan Belanda. Pemindahan kekuasaan ini, meski awalnya ditolak Belanda, diratifikasi melalui Traktat London (Anglo-Dutch Treaty) tahun 1824. Wilayah bekas koloni Belanda ini pun dibangun ulang menjadi Cape Colony (Koloni Tanjung). Pemerintah kolonial Inggris memperkenalkan berbagai kebijakan administratif yang berbeda dari tradisi pemerintahan Belanda, seperti penggunaan bahasa Inggris dalam administrasi, reformasi sistem hukum, sentralisasi pemerintahan, dan pembatasan terhadap praktik-praktik sosial masyarakat Boer. Perubahan ini menimbulkan ketidakpuasan karena dianggap mengancam cara hidup (*way of life*) masyarakat Boer yang telah terbentuk selama beberapa generasi.

Salah satu sumber konflik yang paling signifikan adalah penghapusan perbudakan oleh pemerintah Inggris melalui *Slavery Abolition Act* tahun 1833 yang mulai diberlakukan di Cape Colony pada 1834. Bagi pemerintah Inggris, kebijakan tersebut merupakan bagian dari gerakan abolisionis yang berkembang di Eropa. Namun bagi masyarakat Boer, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah kolonial terhadap hak milik dan kehidupan ekonomi mereka. Selain persoalan ekonomi, kompensasi yang diberikan kepada pemilik budak harus diambil di London dan nilainya dianggap jauh di bawah kerugian yang dialami para petani. Bersamaan dengan itu, kebijakan pemerintah Inggris yang memberikan perlindungan hukum lebih besar kepada penduduk pribumi Afrika dipersepsikan oleh banyak Boer sebagai ancaman terhadap posisi sosial dan politik mereka.

Ketidakpuasan tersebut melahirkan **Great Trek/Die Groot Trek** (1835–1846), yaitu migrasi besar-besaran ribuan keluarga Boer meninggalkan Cape Colony menuju wilayah pedalaman Afrika Selatan. Peristiwa ini memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah bangsa Boer karena dipandang sebagai simbol perjuangan memperoleh kebebasan dari dominasi Inggris sekaligus menjadi fondasi terbentuknya identitas nasional Boer. Hasil dari Great Trek ini adalah pendirian negara bangsa Boer (Republik Boer). Ada beberapa republik Boer yang berhasil didirikan tetapi hanya dua yang berhasil mapan dan diakui dunia internasional. Kedua republik itu adalah Orange Free State (Negara Bebas Oranye/NBO) dan Republik Afrika Selatan (Transvaal). Kedua negara ini didirikan masing-masing pada 1854 dan 1852.

Meskipun Inggris sempat mengakui keberadaan kedua republik tersebut, para pembuat kebijakan di London tidak pernah benar-benar melepaskan ambisi untuk mempertahankan supremasi Inggris di Afrika bagian selatan. Menurut Peter Henshaw dan Iain R. Smith, pengakuan terhadap republik Boer lebih merupakan kompromi sementara akibat keterbatasan sumber daya Inggris daripada

perubahan permanen dalam kebijakan imperialnya. Ketika kondisi strategis berubah pada akhir abad ke-19, Inggris kembali berupaya memperluas pengaruhnya terhadap kedua republik tersebut. Upaya perluasan pengaruh ini kemudian berujung pada perang antara Inggris dengan Cape Colony. Perang Boer adalah perang yang terjadi antara Imperium Britania melawan republik Boer merdeka, yakni Negara Bebas Orange dan Republik Transvaal. Yang melalui berbagai macam cara keduanya saling memperebutkan tempat tersebut, salah satunya dengan jalan perang. Dan perang tersebut dimulai sejak tahun 1889 hingga 1902.

METODE :

Metode penelitian ini lebih berfokus pada metode penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan - tahapan dalam metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu sebagai berikut :

1. **Heuristik** adalah tahap menemukan dan mengumpulkan sumber - sumber sejarah yang mendukung penulisan ini. Peneliti mengumpulkan sumber penelitian ini dari berbagai media seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang mengkaji tentang Pariwisata di Hindia Belanda.
2. **Kritik sumber** adalah tahap menguji kredibilitas sumber tersebut sekaligus menilai apakah sumber tersebut lengkap atau ada bagian hilang. Pada tahap ini peneliti mulai menganalisis kelengkapan dari sumber-sumber yang sudah di kumpulkan
3. **Interpretasi** pada tahap ini akan dilakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh dari data yang valid. Tahap ini peneliti mulai memilah-milah sumber-sumber yang valid dan dapat di percaya dan relevan dengan permasalahan yang sedang di teliti
4. **Historiografi** merupakan tahapan terakhir tujuan dari tahap terakhir ini adalah menyajikan peristiwa sejarah yang benar-benar menceritakan fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi dan bukan cerita fiksi semata, selain itu penulisan ini dapat menyimpulkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Perang Boer

Perang Boer merupakan peperangan antara Imperium Britania dan republik-republik Boer yang merdeka, yaitu Negara Bebas Oranje (Orange Free State) dan Republik Transvaal, yang berlangsung pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Konflik tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari persaingan politik, ekonomi, dan teritorial antara Inggris dan bangsa Boer. Penemuan sumber daya alam berupa intan dan emas di Afrika Selatan menjadi salah satu faktor penting yang mendorong semakin kuatnya kepentingan Inggris terhadap wilayah tersebut.

Penemuan tambang intan pada akhir abad ke-19 menjadi awal meningkatnya kepentingan Inggris terhadap Afrika Selatan. Pada 1869 ditemukan tambang-tambang intan di antara Sungai Vaal

dan Sungai Oranye. Penemuan tersebut membuat pemerintah Inggris semakin menyadari bahwa Afrika Selatan memiliki arti ekonomi dan strategis yang sangat besar. Dua wilayah yang kemudian berkembang sebagai pusat pertambangan adalah Kimberley dan Griqualand. Pada 1871, Griqualand dianeksasi oleh Inggris. Penyelidikan dan pengembangan wilayah pertambangan tersebut antara lain dilakukan oleh Cecil Rhodes. Setelah memperoleh keuntungan dari pertambangan intan, Rhodes menjalin persekutuan dengan C. D. Rudd dan sejumlah perusahaan pertambangan lainnya.

Penemuan emas di Witwatersrand kemudian semakin memperbesar persaingan untuk menguasai Afrika Selatan. Kekayaan emas tersebut menarik kaum imperialis dan kapitalis untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Transvaal. Pada saat yang sama, ribuan pendatang dari berbagai wilayah, termasuk Australia dan California, datang ke Transvaal untuk mencari emas. Bangsa Boer yang telah lebih dahulu menetap di wilayah tersebut mulai mengkhawatirkan kedatangan para pendatang karena jumlah mereka meningkat dengan cepat. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa bangsa Boer akan menjadi minoritas di wilayahnya sendiri.

Pertambahan jumlah pendatang mendorong pemerintah Transvaal menerapkan kebijakan yang membatasi akses politik mereka. Pada 1874 dibuat peraturan mengenai hak pilih bagi penduduk kulit putih. Bagi mereka yang tidak memiliki tanah, hak pilih baru dapat diperoleh setelah menetap di wilayah tersebut selama satu tahun. Kebijakan semacam ini menunjukkan adanya upaya bangsa Boer untuk mempertahankan dominasi politiknya di tengah meningkatnya jumlah pendatang dari Inggris dan negara-negara lain.

Persaingan antara Inggris dan bangsa Boer semakin tajam ketika Inggris mulai melakukan intervensi terhadap Republik Transvaal. Pada saat itu, Transvaal masih terlibat dalam perang melawan suku Sekukuni. Pada 1876, bangsa Boer berhasil mengalahkan Sekukuni, tetapi peperangan tersebut menimbulkan persoalan keuangan bagi pemerintah Transvaal. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, bangsa Boer meminta bantuan kepada Sir Theophilus Shepstone, Gubernur Natal, untuk bertindak sebagai penengah. Namun, kesempatan tersebut justru dimanfaatkan Inggris untuk melakukan intervensi terhadap Transvaal.

Intervensi Inggris berujung pada aneksasi Transvaal pada 1877 dan menjadi salah satu pemicu utama perlawanan bangsa Boer. Inggris menyatakan Transvaal sebagai wilayah jajahannya dan berusaha mempertahankan kekuasaannya melalui kekuatan militer. Pada periode yang sama, Inggris juga terlibat dalam peperangan dengan bangsa Zulu karena menganggap mereka sebagai ancaman terhadap keamanan wilayah Transvaal dan kepentingan Inggris di Afrika Selatan.

Penolakan bangsa Boer terhadap aneksasi Inggris akhirnya berkembang menjadi pemberontakan bersenjata. Di bawah pimpinan Paul Kruger, bangsa Boer di Transvaal melakukan pemberontakan pada Desember 1880. Inggris kemudian mengirimkan pasukan dari Natal yang dipimpin oleh Sir George Colley untuk menghadapi pemberontakan tersebut. Dalam serangkaian pertempuran, pasukan Inggris mengalami kekalahan, terutama dalam Pertempuran Majuba Hill pada Februari 1881. Kekalahan tersebut memaksa Inggris melakukan perundingan dengan bangsa Boer.

Setelah peristiwa Majuba Hill, gerakan politik Afrikander Bond juga semakin berkembang sebagai wadah politik masyarakat Afrikaner.

Selain kepentingan ekonomi, ekspansi Inggris di Afrika Selatan juga didorong oleh ideologi imperialisme. Para tokoh imperialis Inggris berusaha memperluas wilayah kekuasaan Inggris sejauh mungkin. Salah satu tokoh terpenting dalam kebijakan tersebut adalah Cecil Rhodes. Rhodes merupakan seorang imperialis yang berusaha menggunakan kekayaan yang diperolehnya dari pertambangan untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh Inggris. Ia menginginkan terbentuknya suatu federasi yang menggabungkan republik-republik Boer, yaitu Transvaal dan Orange Free State, dengan wilayah kekuasaan Inggris seperti Natal dan Cape Colony. Meskipun gagasan tersebut tampak sebagai upaya untuk menyatukan penduduk Belanda dan Inggris di Afrika Selatan, tujuan utama Rhodes tetap memperluas kekuasaan Inggris ke wilayah-wilayah di sebelah utara.

Keinginan Inggris untuk memperluas wilayah ke utara mendorong persaingan dengan bangsa Boer di Bechuanaland. Pada 1884, Konvensi Pretoria diperbarui melalui Konvensi London. Dalam perjanjian tersebut, kemerdekaan Republik Transvaal diakui kembali oleh Inggris, meskipun Transvaal tetap memiliki sejumlah keterikatan dalam hubungan luar negerinya. Pada periode yang sama, kelompok-kelompok Boer yang meninggalkan wilayahnya mendirikan negara-negara baru di Bechuanaland, Goozen, dan Stellaland. Bechuanaland memiliki posisi strategis karena terletak di sebelah utara Cape Colony dan menjadi koridor yang menghubungkan Transvaal dengan Orange Free State. Karena kedudukannya tersebut, Rhodes menggambarkan Bechuanaland sebagai semacam “Terusan Suez” Afrika Selatan dan menganggapnya sebagai pintu gerbang menuju wilayah utara.

Penguasaan Bechuanaland menjadi bagian penting dari strategi ekspansi Inggris ke Afrika bagian utara. Goozen dan Stellaland terletak di antara republik-republik Boer dan Gurun Kalahari sehingga kawasan tersebut memiliki nilai strategis bagi perluasan pengaruh Inggris. Untuk mewujudkan ekspansi ke utara, Rhodes berusaha memperoleh pengaruh politik di Cape Colony. Setelah berhasil menduduki posisi politik yang kuat di Cape Colony, ia melakukan agitasi untuk mendukung ekspansi Inggris ke Bechuanaland. Pada 1884, Rhodes mengunjungi wilayah tersebut, sementara bangsa Boer dari Transvaal juga sedang berusaha memperluas pengaruhnya. Persaingan tersebut akhirnya mendorong pemerintah Inggris pada 1885 mengirim pasukan untuk mengusir orang-orang Boer dari Goozen dan Stellaland serta menganeksasi Bechuanaland. Wilayah tersebut kemudian berada di bawah protektorat Inggris dan menjadi bagian dari jalur ekspansi Inggris ke arah utara.

Persaingan Inggris dan bangsa Boer semakin memuncak pada masa pemerintahan Lord Salisbury dan meningkatnya pengaruh Joseph Chamberlain. Ketika J. Chamberlain menjabat sebagai Menteri Koloni, imperialisme Inggris memasuki periode yang semakin agresif. Chamberlain lebih mengutamakan kepentingan imperialisme dan perluasan kekuasaan Inggris. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi Inggris, terutama dalam menghadapi persoalan perdagangan dan kebutuhan untuk memperoleh sumber daya serta wilayah baru. Dalam konteks Afrika Selatan, Chamberlain melanjutkan gagasan Rhodes mengenai pembangunan jalur kereta api Cape Town–Cairo.

Untuk mewujudkan kepentingan imperial tersebut, wilayah Sudan dan republik-republik Boer dianggap memiliki posisi strategis. Sudan penting karena produksi kapasnya, sedangkan republik Boer memiliki kekayaan emas dan intan yang sangat besar.

Persoalan hak politik kaum Uitlander menjadi salah satu sumber ketegangan utama antara pemerintah Transvaal dan Inggris. Kaum Uitlander merupakan para pendatang, terutama yang berasal dari Inggris, yang datang ke Transvaal karena perkembangan pertambangan emas. Jumlah mereka meningkat dengan cepat sehingga bangsa Boer khawatir bahwa para pendatang tersebut pada akhirnya akan menguasai kehidupan politik Transvaal. Kekhawatiran tersebut semakin besar karena kaum Uitlander memiliki kekuatan ekonomi yang besar, tetapi tidak memperoleh hak politik yang sebanding. Presiden Transvaal, Paul Kruger, kemudian menerapkan kebijakan yang membatasi pemberian hak kewarganegaraan dan hak pilih kepada mereka.

Perselisihan mengenai hak politik kaum Uitlander kemudian dibahas dalam Konferensi Bloemfontein. Pertemuan tersebut mempertemukan pemerintah Inggris dengan pemerintah Transvaal yang dipimpin Presiden Kruger. Pemerintah Transvaal tetap berhati-hati dalam memberikan hak politik kepada para pendatang. Meskipun kaum Uitlander membayar pajak dalam jumlah besar, kesempatan mereka untuk memperoleh kewarganegaraan dan hak memilih tetap terbatas. Kebijakan tersebut semakin memperbesar ketidakpuasan kaum Uitlander sekaligus memberikan alasan bagi pemerintah Inggris untuk menekan Transvaal.

Ketegangan antara kaum Uitlander dan pemerintah Transvaal mencapai puncaknya melalui Jameson Raid pada 1895. Karena merasa tidak memperoleh perbaikan kondisi melalui jalur konstitusional, kelompok penduduk berbahasa Inggris melakukan upaya pemberontakan terhadap pemerintah Transvaal. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Jameson Raid. Meskipun usaha tersebut mengalami kegagalan, dampaknya sangat besar karena memperburuk hubungan antara Inggris dan bangsa Boer serta menimbulkan ketegangan baru di seluruh Afrika Selatan.

Jameson Raid memperkuat keinginan bangsa Boer untuk mempertahankan persatuan politik dan kemerdekaan mereka dari pengaruh Inggris. Penduduk berbahasa Belanda di Orange Free State menunjukkan solidaritas terhadap Transvaal dan menganggap republik tersebut sebagai salah satu pusat perjuangan bangsa Boer. Sebagian bangsa Boer menginginkan terbentuknya suatu republik yang lebih luas di Afrika Selatan, yang mencakup wilayah dari Cape hingga Zambesi. Sebaliknya, pemerintah dan kelompok pendukung Inggris menghendaki agar wilayah-wilayah tersebut tetap berada dalam lingkup British Empire. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan hubungan antara Inggris dan kedua republik Boer semakin memburuk.

Upaya terakhir untuk menghindari perang dilakukan melalui Konferensi Bloemfontein pada Mei–Juni 1899 yang mempertemukan Alfred Milner dan Presiden Paul Kruger. Milner menuntut pemberian hak politik yang lebih luas bagi Uitlanders, sedangkan Kruger bersikeras mempertahankan kedaulatan Transvaal. Perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan. Setelah itu kedua pihak melakukan mobilisasi militer secara besar-besaran. Pada 9 Oktober 1899, Transvaal mengeluarkan

ultimatum agar Inggris menarik pasukannya dari perbatasan. Inggris menolak ultimatum tersebut, dan pada 11 Oktober 1899 pecahlah Perang Boer Kedua. Banyak sejarawan menilai bahwa pada tahap ini perang hampir tidak dapat dihindari karena kedua pihak telah memiliki tujuan politik yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan.

Kegagalan penyelesaian diplomatik akhirnya membawa Inggris dan bangsa Boer menuju perang terbuka. Pada 1899, pemerintah Transvaal berusaha menyelesaikan perselisihan melalui jalur diplomatik dan meminta agar Inggris menghentikan pengiriman pasukannya ke Afrika Selatan. Namun, tuntutan bangsa Boer tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan dari pemerintah Inggris. Ketegangan terus meningkat hingga akhirnya bangsa Boer menyatakan perang terhadap Inggris pada Oktober 1899. Peristiwa tersebut menandai dimulainya Perang Boer Kedua, yang kemudian menjadi salah satu konflik terpenting dalam sejarah imperialisme Inggris di Afrika Selatan.

B. Jalannya Perang Boer

Setelah kegagalan Konferensi Bloemfontein pada pertengahan 1899, hubungan diplomatik antara Inggris dan Transvaal memburuk dengan cepat. Pemerintah Transvaal di bawah Presiden Paul Kruger menilai bahwa Inggris sengaja menempatkan pasukan dalam jumlah besar di sepanjang perbatasan sebagai persiapan invasi. Pada 9 Oktober 1899, Transvaal mengeluarkan ultimatum yang menuntut agar Inggris menarik seluruh pasukannya dari wilayah perbatasan dalam waktu 48 jam. Pemerintah Inggris menolak ultimatum tersebut sehingga pada 11 Oktober 1899 perang resmi dimulai. Berbeda dengan perkiraan pemerintah Inggris yang menganggap perang akan berlangsung singkat, kedua republik Boer justru mengambil inisiatif menyerang lebih dahulu. Pasukan Boer memasuki wilayah koloni Inggris di Natal dan Cape Colony dengan tujuan memperoleh keuntungan strategis sebelum bala bantuan Inggris tiba dari Eropa. Strategi ofensif awal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Boer memahami keterbatasan jumlah pasukan mereka dan berusaha memanfaatkan keunggulan mobilitas pada tahap awal perang.

Pada fase awal, pasukan Boer memperoleh berbagai kemenangan yang mengejutkan dunia. Tidak seperti tentara reguler Eropa yang bertempur dalam formasi infanteri besar, pasukan Boer terdiri atas satuan commando, yakni milisi berkuda yang sangat lincah, mampu bergerak cepat, dan mahir menggunakan senapan jarak jauh. Mereka memanfaatkan medan pegunungan, bukit (kopjes), dan semak belukar Afrika Selatan sebagai perlindungan alami. Keberhasilan terbesar Boer pada tahap ini adalah pengepungan terhadap tiga kota strategis milik Inggris, yaitu Ladysmith, Kimberley, dan Mafeking. Ketiga pengepungan tersebut menghambat pergerakan Inggris sekaligus memaksa London mengirim bala bantuan dalam jumlah besar dari berbagai wilayah imperium.

Puncak keberhasilan Boer terjadi pada pertengahan Desember 1899 dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Black Week (10–17 Desember 1899). Dalam rentang waktu kurang dari satu minggu, Inggris mengalami kekalahan beruntun pada Pertempuran Stormberg, Magersfontein, dan

Colenso. Kekalahan ini mengguncang opini publik Inggris karena menunjukkan bahwa tentara kerajaan yang selama ini dianggap tidak terkalahkan ternyata dapat dikalahkan oleh pasukan petani Boer yang jauh lebih sedikit jumlahnya. Menurut Thomas Pakenham dan Bill Nasson, keberhasilan Boer pada fase awal terutama disebabkan oleh kemampuan mereka memanfaatkan senapan modern Mauser, disiplin menembak, mobilitas pasukan berkuda, serta kesalahan taktis komandan Inggris yang masih menerapkan doktrin perang konvensional abad ke-19.

Kekalahan pada Black Week mendorong pemerintah Inggris melakukan reorganisasi besar-besaran terhadap angkatan bersenjata. Komando perang dialihkan kepada Field Marshal Lord Roberts, dengan Lord Kitchener sebagai Kepala Staf. Bersamaan dengan itu, Inggris mengirim lebih dari 180.000 pasukan tambahan beserta artileri modern, logistik yang lebih baik, dan jaringan kereta api militer yang memungkinkan mobilisasi pasukan secara cepat. Mulai Februari 1900, Inggris melancarkan serangan balasan secara sistematis. Salah satu keberhasilan pertama adalah pembebasan Kimberley, diikuti kemenangan pada Pertempuran Paardeberg (18–27 Februari 1900), yang berakhir dengan penyerahan Jenderal Piet Cronjé beserta sekitar 4.000 pasukannya. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi republik Boer karena menghilangkan salah satu komandan paling berpengalaman mereka.

Setelah itu, Inggris berhasil merebut Bloemfontein, ibu kota Orange Free State, pada Maret 1900 dan Pretoria, ibu kota Transvaal, pada Juni 1900. Dengan jatuhnya kedua ibu kota tersebut, pemerintah Inggris menganggap perang hampir selesai. Orange Free State kemudian dianeksasi menjadi Orange River Colony, sedangkan Transvaal ditempatkan di bawah administrasi militer Inggris. Namun, perkiraan tersebut terbukti keliru. Meskipun kehilangan pusat pemerintahan, sebagian besar pasukan Boer tetap utuh dan menolak menyerah. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Louis Botha, Christiaan de Wet, Koos de la Rey, dan Jan Smuts, mereka mengubah strategi perang secara fundamental.

Mulai September 1900, perang memasuki fase gerilya yang menjadi ciri paling khas Perang Boer. Pasukan Boer tidak lagi mempertahankan kota atau benteng, melainkan bergerak dalam kelompok-kelompok kecil yang menyerang jalur kereta api, konvoi logistik, pos militer, serta garnisun Inggris sebelum segera menghilang ke pedalaman. Strategi ini memungkinkan mereka mempertahankan perlawanan meskipun kehilangan hampir seluruh wilayah administratifnya.

Perang gerilya menyebabkan Inggris menghadapi kesulitan besar. Meskipun memiliki keunggulan jumlah pasukan dan persenjataan, mereka kesulitan memaksa pasukan Boer bertempur dalam pertempuran terbuka. Akibatnya, perang yang semula diperkirakan berlangsung beberapa bulan berubah menjadi konflik berkepanjangan yang menguras biaya, logistik, dan moral tentara Inggris. Untuk mengatasi situasi tersebut, Lord Kitchener menerapkan serangkaian kebijakan yang sangat keras. Salah satunya adalah strategi bumi hangus (*scorched earth policy*), yaitu penghancuran rumah-rumah pertanian Boer, pembakaran ladang, penyitaan ternak, dan penghancuran sumber-sumber pangan yang diduga dapat mendukung gerilyawan. Selain itu, Inggris membangun lebih dari 8.000 blockhouses yang

dihubungkan oleh kawat berduri untuk membatasi ruang gerak pasukan Boer dan mengamankan jalur komunikasi.

Kebijakan paling kontroversial adalah pemindahan perempuan, anak-anak, dan penduduk sipil Boer ke dalam kamp-kamp konsentrasi (concentration camps). Tujuan resmi kebijakan ini adalah memutus dukungan logistik bagi pasukan gerilya. Namun, kondisi sanitasi yang buruk, kekurangan makanan, dan merebaknya penyakit menyebabkan tingginya angka kematian di kamp-kamp tersebut. Selain warga Boer, ribuan penduduk Afrika kulit hitam juga ditempatkan dalam kamp-kamp terpisah dengan kondisi yang tidak kalah memprihatinkan. Menurut penelitian Elizabeth van Heyningen dan Peter Warwick, kebijakan ini menjadi salah satu aspek paling kontroversial dalam sejarah kolonial Inggris dan meninggalkan trauma mendalam dalam masyarakat Afrika Selatan.

C. Akhir Perang dan Dampak Perang Boer

Pada tahun 1902, jenderal-jenderal Boer menyetujui diadakannya perundingan perdamaian antara kedua belah pihak. Perundingan tersebut dilaksanakan di kota Vereeniging, hasil perundingan tersebut dikenal dengan Perjanjian Vereeniging. Keputusan yang diambil dalam perjanjian tersebut, yaitu:

1. Republik-republik Transvaal dan Orange Free State berada di bawah kekuasaan Inggris.
2. Orang-orang Boer menjadi warga Inggris. Mereka diberi janji akan mendapat uang guna membangun kembali perkampungan mereka.
3. Pemerintahan sendiri akan diberikan secepat-cepatnya.
4. Bahasa Belanda dan Inggris diberikan di sekolah-sekolah dan dipakai di lapangan pengadilan.

Dampak yang terjadi setelah terjadinya Perang Boer, daerah-daerah yang dikuasai Inggris di Afrika Selatan yaitu Cape Colony, Natal, Orange Free State, dan Transvaal diberi pemerintahan sendiri dan semua daerah tergabung dalam Uni Afrika Selatan. Konvensi tersebut bertujuan untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan membentuk sebuah Uni yang memiliki sebuah pemerintahan pusat dan satu parlemen pusat sebagai badan legislatif. Dalam konvensi tersebut dicapai kesepakatan untuk membentuk parlemen Uni dan memilih wakil-wakil yang duduk di parlemen.

KESIMPULAN DAN SARAN:

Perang Boer memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan Afrika Selatan. Secara politik, perang mengakhiri kemerdekaan republik Boer dan membuka jalan bagi pembentukan **Union of South Africa** pada tahun 1910 di bawah kekuasaan Imperium Britania. Secara sosial, perang meninggalkan trauma mendalam melalui kebijakan bumi hangus dan kamp konsentrasi yang menewaskan puluhan ribu warga sipil Boer serta penduduk Afrika. Dari sisi ekonomi, konflik mempercepat integrasi Afrika Selatan ke dalam sistem kapitalisme global berbasis industri pertambangan dan pembangunan infrastruktur kolonial. Di bidang politik dan hubungan antarras,

rekonsiliasi antara elite Inggris dan Afrikaner justru menghasilkan marginalisasi masyarakat Afrika kulit hitam, sehingga meletakkan dasar bagi kebijakan segregasi rasial yang kemudian berkembang menjadi apartheid. Oleh karena itu, Perang Boer harus dipahami bukan hanya sebagai akhir dari konflik antara Inggris dan republik Boer, melainkan sebagai peristiwa historis yang membentuk struktur negara, masyarakat, dan politik Afrika Selatan sepanjang abad ke-20.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bossenbroek, M. (2018). *The Boer War*. Seven Stories Press.

Cuthbertson, G., Grundlingh, A., & Suttie, M.-L. (Eds.). (2002). *Writing a Wider War: Rethinking Gender, Race, and Identity in the South African War, 1899–1902*. Ohio University Press.

Nasson, B. (1999). *The Boer War*. Arnold.

Pakenham, T. (1979). *The Boer War*. Weidenfeld & Nicolson.

Soeratman, Darsiti. (2012). *Sejarah Afrika*. Ombak

Toynbee, Arnold. (2007). *Sejarah Umat Manusia Uraian Analisis, Kronologis, Naratif, dan Komparatif*. Pustaka Pelajar.

Artikel Jurnal

Beckett, I. F. W. (1991). The historiography of small wars: Early historians and the South African war. *Small Wars & Insurgencies*, 2(2), 276–298. <https://doi.org/10.1080/09592319108422982>

De Jong, C (2012) Lessons from the Boer War. *Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies*, 19(4), 37-41. DOI: <https://doi.org/10.5787/19-4-375>

Porter, Andrew (2000). THE SOUTH AFRICAN WAR AND THE HISTORIANS, *African Affairs*, 99(397), 633–648, <https://doi.org/10.1093/afraf/99.397.633>

Van Heyningen, E. (2008). Costly Mythologies: The Concentration Camps of the South African War in Afrikaner Historiography*. *Journal of Southern African Studies*, 34(3), 495–513. <https://doi.org/10.1080/03057070802259670>